



RENJA PERUBAHAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2022



DINAS SOSIAL

KABUPATEN BULELENG



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga mempedomani ataupun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 serta mempedomani kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi.

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng substansinya memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Renja ini akan menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan), penyusunan LKjIP serta program dan kegiatan lainnya yang terkait.

Kami selaku Pimpinan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menaruh harapan besar agar Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan masalah sosial di Kabupaten Buleleng, sehingga masyarakat Buleleng semakin sejahtera.

Dengan telah selesainya penyusunan Renja Perubahan ini, tidak lupa kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini, semoga apa yang telah diberikan mendapat rahmat/karunia dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 050/485/HK/2022
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	5
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
BAB IV. P E N U T U P	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga pemerintah di daerah, maka dalam sistem perencanaan pembangunan berpedoman pada UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi yang saling terkait antara perencanaan ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka diamanatkan bagi daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dalam upaya pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari suatu perencanaan, baik perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun yang bersifat perencanaan tahunan (RKP). Berkaitan dengan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengamanatkan Bupati/Walikota mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya menyusun Rancangan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program prioritas yang disampaikan/disosialisasikan pada waktu menjadi Calon Bupati serta paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Berkenaan dengan ketentuan dimaksud Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Buleleng tahun

2017-2022. Perda RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berkenaan dengan amanat tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang merupakan penjabaran dari Renstra yang dituangkan dalam setiap tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilaksanakan dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Melalui Renja Perubahan Dinas Sosial akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Sosial Kabupaten Buleleng akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan perencanaan di atasnya serta peraturan perundangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja/ Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang RI. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang -Undang RI. No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
3. Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden RI. No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
12. Perda Kabupaten Buleleng No.3 Tahun 2013 Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk terwujudnya konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan dalam lingkup Dinas Sosial dan tersedianya pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Tahun 2022 maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Tahun 2022 serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2022.
2. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Dinas Sosial untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dari Penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2022

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang sosial yang dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2022. Pencapaian kinerja tahun 2022 triwulan II tersebut di dukung melalui pelaksanaan 5 Program dan 6 kegiatan yang menjadi program utama dan 1 program serta 5 kegiatan yang menjadi program penunjang dengan jumlah anggaran dari dana Belanja sebesar Rp.9.889.195.000,00 dengan realisasi triwulan II sebesar Rp.4.678.817.138,00 atau 47,31%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan tergambar pada realisasi belanja langsung. Pencapaian target program kegiatan sudah tercapai secara fisik untuk triwulan II sebesar 63,04%.

Pelaksanaan program dan kegiatan tercapai tentunya berkat dukungan dan koordinasi dari Dinas/Instansi terkait, partisipasi aktif dari masyarakat, para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT) yang ada di masing masing Desa serta Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di masing-masing Kecamatan, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Buleleng.

Adapun Tabel Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2022
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8.900.864.000				4.678.817.138
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik		100 %	5.374.012.093	APBD II		52,85 %	2.485.992.848
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran sesuai target, Persentase perencanaan anggaran skpd yang sesuai renstra	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	253.804.320	APBD II		53,67%	100.652.324
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	8 Dokumen	75.347.840	APBD II		4 Dokumen	38.090.480,00
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	7 Dokumen / Laporan	178.456.480	APBD II		4 Dokumen/ Laporan	62.561.844,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	4.013.812.980	APBD II		58,33%	1.970.481.831
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	3.544.750.000	APBD II		7 Laporan	1.719.138.503,00
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	274.074.300	APBD II		7 Laporan	150.396.550,00
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	194.988.680	APBD II		7 Laporan	100.946.778,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase pelaksanaan pameran pembangunan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100%	293.829.553	APBD II		44,95%	53.550.994
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	6 Buah, 8 Unit	15.753.000	APBD II		1 Buah, 3 Unit	6.080.140,00
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	30 Unit	5.000.000	APBD II		30 Unit	4.966.500,00
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman, Jumlah Pameran, Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	20 Unit, 20 Unit, 40 Unit	118.257.935	APBD II		11 Unit, 0 Unit, 20 Unit	31.578.284,00
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	6 Buah, 58000 Lembar	22.347.525	APBD II		4 Buah, 34.000 Lembar	10.926.070,00
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	132.471.093	APBD II		0 Laporan	-
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	730.540.365	APBD II		54,08%	322.248.807
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk / keluar	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2000 Eksemplar	72.078.855	APBD II		1.160 Eksemplar	37.191.179,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telpon dan listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	132 Rekening	237.001.000	APBD II		66 Rekening	81.354.124,00
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2 Unit	223.200.000	APBD II		1 Unit	90.826.000,00
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan, jumlah alat tulis kantor, jumlah tenaga kebersihan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Unit, 12 Unit, 0 Orang	198.260.510	APBD II		7 Unit, 7 Unit	112.877.504,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	82.024.875	APBD II		53,33%	39.058.892
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah perijinan kendaraan dinas operasional	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	25 Unit, 25 Unit	52.258.875	APBD II		10 Unit, 10 unit	12.788.027,00
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Unit	29.766.000	APBD II		8 Unit	26.270.865,00
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin	Kabupaten Buleleng	14.50 %	1.136.272.000	APBD II		12,28%	861.895.139
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	14.5 %	1.136.272.000	APBD II		12,28%	861.895.139

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, jumlah PMKS penerima sembako	Kabupaten Buleleng	140 Orang, 148 Desa/ Kelurahan	178.113.600	APBD II		151 Orang, 148 Desa/Kelurahan	75.196.894,00
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial. Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial. Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	9 Karang Taruna, 9 PSM, 9 TKSK	146.600.000	APBD II		9 Karang Taruna, 9 PSM, 9 TKSK	41.687.400,00
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan, Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha, Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Kabupaten Buleleng	17 Panti Asuhan, 2 Karang Taruna, 250 Orang	811.558.400	APBD II		2 Panti Asuhan, 2 Lembaga, 9 Karang Taruna	745.010.845,00
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		45.30 %	857.121.360	APBD II		22,48%	581.517.155
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	Kabupaten Buleleng	15.4 %	441.936.160	APBD II		4,95%	179.624.170
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	820 Orang	131.043.840	APBD II		120 Orang	72.891.522,00
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	Kabupaten Buleleng	530 Orang	73.456.800	APBD II		75 Orang	24.649.448,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja. Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja. Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja.	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen, 20 Orang, 900 Anak	114.500.640	APBD II		0,40 Dokumen, 100 Anak	42.244.100,00
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	50 Orang	122.934.880	APBD II		100 Orang	39.839.100,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan , persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	Kabupaten Buleleng	19.5 %	415.185.200	APBD II		13,09%	401.892.985
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	Kabupaten Buleleng	30 Orang	341.728.400	APBD II		115 Orang, 1 Lembaga	341.844.720,00
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kabupaten Buleleng	1.000 Orang	73.456.800	APBD II		80 Orang	60.048.265,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	05			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		84 %	227.853.720	APBD II		84 %	157.815.360
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	84 %	227.853.720	APBD II		84 %	157.815.360
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemutakhiran data penduduk miskin	Kabupaten Buleleng	148 Desa/ Kelurahan	103.804.640	APBD II		148 Desa/Kelurahan	67.215.318
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	1 Lembaga	124.049.080	APBD II		1 Lembaga	90.600.042,00
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		84 %	275.219.840	APBD II		7 %	59.882.807
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	84 %	275.219.840	APBD II		7 %	59.882.807
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan. Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	Kabupaten Buleleng	10 Orang, 500 KK	275.219.840	APBD II		0 Orang, 75 KK	59.882.807,00
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal		18 %	1.030.384.987	APBD II		14,90 %	531.713.829
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan	Kabupaten Buleleng	18 %	1.030.384.987	APBD II		14,90 %	531.713.829

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Realisasi DPA Triwulan II	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	5 Kegiatan, 400 Orang, 9 TKSK	203.456.800	APBD II		1 Kegiatan, 100 Orang, 9 TKSK	197.084.496
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Kabupaten Buleleng	5 Monumen	735.524.747	APBD II		5 Monumen	294.594.416,00
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan dan monumen tugu perjuangan	Kabupaten Buleleng	5 Monumen	91.403.440	APBD II		5 Monumen	40.034.917,00

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja dari pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial; Pelaksanaan rehabilitasi penyandang permasalahan sosial; Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial; Pemberian perijinan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan baik yang menyangkut pelayanan sosial, pemberdayaan lembaga sosial maupun pembinaan karang taruna dan petugas sosial lainnya serta yang berkaitan dengan penataan dan pelestarian monumen serta penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya penanganan Isu Strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan. Program dan kegiatan tersebut akan menjawab terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Buleleng terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial/Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan yang lainnya.

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruhan wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan. Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan dengan SKPD/ Lembaga terkait.

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali (Jatim) tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial;
- c. Penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan lain lain) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya;
- d. Rentannya wilayah Buleleng terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud.
- e. Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng, orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan).
- f. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan ataupun di stop karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya. Adapun peluang dimaksud adalah:

- a. Adanya jalinan koordinasi yang kooperatif dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah sosial.
- b. Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penangannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022 diambil dari usulan masyarakat melalui Musrenbang tahun anggaran 2021, desa lokus, Hibah Bansos dari Aplikasi dan usulan isidentil dari desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengakomodir usulan musrenbang dari masyarakat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup manusia, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud meliputi Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial. Dari keseluruhan penyelenggaraan sosial tersebut strategi pembangunan yang dikembangkan untuk tercapainya perwujudan tujuan dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pendeteksian, pencegahan timbulnya masalah sosial
- b. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. Melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemetaan kerawanan sosial dalam upaya mendukung pendeteksian, pencegahan dan mitigasi timbulnya masalah sosial
- d. Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah sosial
- e. Meningkatkan pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial.
- f. Meningkatkan pengkajian dan pendataan nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan;
- g. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional pelayanan penanganan masalah sosial
- h. Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian SDM dalam mendukung kinerja penanganan masalah sosial

Program Nasional yang menjadi prioritas terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yaitu dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan antara lain kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

- Tujuan Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu :
 - a). Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga;
 - b). Mengetahui secara dini dan munculnya kerawanan sosial;
 - c). Mencegah terhadap munculnya kerawanan sosial;
 - d). Mengidentifikasi dan menginventarisasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
 - e). Pemetaan lokasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
 - f). Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - h). Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi karang taruna dan pekerja sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya ;
 - i). Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

- Sasaran yang ingin dicapai adalah:
 - a). Meningkatnya koordinasi dan kerjasama yang semakin mantap dalam penanggulangan masalah sosial;
 - b). Diketuainya/terdeteksinya secara dini terhadap munculnya kerawanan sosial;
 - c). Dapat dicegahnya terhadap munculnya kerawanan sosial;
 - d). Teridentifikasinya dan terinventarisasinya kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
 - e). Terpetakannya lokasi dan jenis kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
 - f). Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3.3. Program dan Kegiatan:

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi pencapaian sasaran, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

4. Program Penanganan Bencana

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dari 5 program yang menjadi program wajib dan 6 kegiatan serta 15 sub kegiatan, terdapat pula 1 program dan 5 kegiatan serta 17 sub kegiatan yang merupakan program

penunjang. Penyebaran program dan kegiatan dialokasikan pada usulan hasil Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten yang menjadi program prioritas dari tiap-tiap Desa/Kelurahan serta desa yang menjadi lokasi program Pengentasan Kemiskinan. Tabel Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

TABEL
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				10.801.967.866		
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik		100 %	6.019.493.842	APBD II	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran sesuai target, Persentase perencanaan anggaran skpd yang sesuai renstra	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	249.762.039	APBD II	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	8 Dokumen	98.105.470	APBD II	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	7 Dokumen / Laporan	151.656.569	APBD II	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	4.537.868.761	APBD II	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	3.914.062.899	APBD II	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	374.064.927	APBD II	
1 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	249.740.935	APBD II	
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase pelaksanaan pameran pembangunan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100%	275.119.504	APBD II	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	8 Unit	24.344.100	APBD II	
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	10 Unit	84.886.500	APBD II	
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman, Jumlah Pameran, Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	20 Unit, 40 Unit	112.264.800	APBD II	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	22 Buah, 67.865 Lembar	20.630.104	APBD II	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	-	-	APBD II	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	32.994.000	APBD II	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	814.241.738	APBD II	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk / keluar	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2000 Eksemplar	74.495.780	APBD II	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telpon dan listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	132 Rekening	237.001.000	APBD II	
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2 Unit	235.894.000	APBD II	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan, jumlah alat tulis kantor, jumlah tenaga kebersihan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Unit, 12 Unit	266.850.958	APBD II	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	142.501.800	APBD II	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah perijinan kendaraan dinas operasional	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	25 Unit, 30 Unit	43.455.000	APBD II	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Unit	49.896.000	APBD II	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1 Paket	49.150.800	APBD II	
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin	Kabupaten Buleleng	14.50 %	1.309.771.614	APBD II	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	14.5 %	1.309.771.614	APBD II	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, jumlah PMKS penerima sembako	Kabupaten Buleleng	530 Orang, 148 Desa/Kelurahan	286.655.959	APBD II	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial. Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial. Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	18 Karang Taruna, 9 PSM, 9 TKSK	132.568.100	APBD II	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan, Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha, Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Kabupaten Buleleng	17 Panti Asuhan, 2 Lembaga, 18 Karang Taruna	890.547.555	APBD II	
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		45.30 %	1.293.742.211	APBD II	
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan , persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	Kabupaten Buleleng	15.4 %	737.241.334	APBD II	
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	350 Orang	206.159.103	APBD II	
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	Kabupaten Buleleng	158 Orang	148.560.344	APBD II	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja. Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja. Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen, 300 Anak	141.504.603	APBD II	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	550 Orang	241.017.284	APBD II	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan , persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	Kabupaten Buleleng	19.5 %	556.500.877	APBD II	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	Kabupaten Buleleng	1 Lembaga, 130 Orang	393.844.140	APBD II	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kabupaten Buleleng	300 Orang	162.656.737	APBD II	
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kabupaten Buleleng	-	-	APBD II	
1 06 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		84 %	505.546.010	APBD II	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	84 %	505.546.010	APBD II	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemutahiran data penduduk miskin	Kabupaten Buleleng	148 Desa/Kelurahan	298.123.319	APBD II	
	2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	1 Lembaga	207.422.691	APBD II	
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		84 %	266.072.494	APBD II	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	84 %	266.072.494	APBD II	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan. Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	Kabupaten Buleleng	10 Orang, 450 KK	266.072.494	APBD II	
1 06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal		18 %	1.407.341.695	APBD II	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan	Kabupaten Buleleng	18 %	1.407.341.695	APBD II	
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	4 Kegiatan, 400 Orang	559.916.610	APBD II	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Kabupaten Buleleng	5 Monumen	750.244.167	APBD II	
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan dan monumen tugu perjuangan	Kabupaten Buleleng	5 Monumen	97.180.918	APBD II	

BAB IV

P E N U T U P

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa ada dukungan dan partisipasi dari seluruh Komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sebagai mitra kerja, untuk itulah dituntut koordinasi dan kerjasama yang komunikatif dan berkelanjutan sehingga Pembangunan manusia khususnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan yaitu tercapainya masyarakat yang Mandiri, Sejahtera lahir dan batin berdasarkan konsep hidup Tri Hita Karana.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2022 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Bappeda juga mempedomani ataupun berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Renja ini substansinya memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam 1 (satu) tahun.

Renja Perubahan ini juga menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Dinas Sosial Buleleng serta dalam penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Untuk dapat berhasilnya pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bagian/Bidang yang ada didalam jajaran kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan;
2. Perlu adanya konsistensi dan sinergi antar bidang dalam perencanaan pembangunan, sehingga dalam implementasinya terpadu dan terintegrasi;
3. Perlu adanya dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan *stakeholders* lainnya untuk mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta sasaran Pembangunan Kabupaten Buleleng dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan dari Dinas Sosial Tahun 2022 ini disusun semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk kita semua khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).